

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai individu maupun kelompok turut serta secara aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara ikut menentukan pilihan terhadap kandidat pemimpin yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Proses partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik atau *public policy*. Anggota ataupun kelompok masyarakat yang menyalurkan partisipasinya dalam suatu pemilihan tentunya didorong akan keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut sekurang-kurangnya mereka dapat diperhatikan dan sedikit mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mengikat. (Halim & Muhlin, 2015:19)

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang paling nyata di Desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades terjadi kompetisi yang bebas berbasis partisipasi masyarakat dalam pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Pemilihan kepala desa juga merupakan suatu rangkaian aktivitas politik yang mencerminkan bagaimana proses demokrasi telah terjadi di tingkat desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wastiono (1993) menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa bukan sekedar untuk memperoleh kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye yang digunakan untuk merebut hati masyarakat, akan tetapi lebih dari

itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan. Sehingga seringkali di berbagai daerah dalam proses pemilihan kepala desa ini menimbulkan berbagai konflik di masyarakat.

Dalam pemilihan kepala desa ada hal menarik yang sudah menjadi kekhasan dalam praktik demokrasi di tingkat lokal desa. Hal tersebut adalah tidak digunakannya partai politik sebagai alat untuk mengusung calon yang akan bertarung pada pemilihan kepala desa. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa dinamika politik dalam pemilihan kepala desa akan terasa hambar. Ketidakhadiran partai politik dalam kontestasi demokrasi di tingkat desa ini justru akan memberikan warna tersendiri dengan persaingan yang dibangun oleh elit-elit politik lokal yang ada di Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu tolak ukur bahwa kedudukan desa dalam sistem pemerintahan mempunyai posisi yang penting. Dalam perkembangannya pelaksanaan pemilihan kepala desa cenderung lebih terbuka, artinya bahwa setiap masyarakat desa yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Undang-Undang Desa berhak untuk memilih dan dipilih, baik untuk mencalonkan diri maupun memilih orang diluar dirinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Desa terbaru tersebut juga memberikan ruang bagi petahana ataupun diluar petahana untuk memimpin desa dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana telah diatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan yang sebelumnya hanya 2 (dua) kali masa jabatan.

Desa Simpursia Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Simpursia merupakan salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Wajo pada tahun 2015 dilaksanakan secara serentak. Proses kontestasi pada pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi yang baik di tingkat desa dimana pada waktu itu diikuti oleh 4 (empat) calon kandidat kepala desa. Dimana yang diikuti oleh elit desa yaitu petahana kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) periode dan tokoh masyarakat yang satu diantaranya merupakan kepala dusun. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh petahana sehingga menjadi masa jabatan atau periodenya yang ketiga.

Petahana bernama Muhammad Husain yang kembali terpilih untuk periode ketiga uniknya adalah sebenarnya dia bukanlah penduduk asli Desa Simpursia. Muhammad Husain yang berlatar belakang militer mulanya hanya menjabat sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Simpursia. Sebagai seorang Babinsa dia dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Melihat adanya dorongan yang besar dari berbagai lapisan masyarakat dan peluang cukup terbuka dalam kontestasi pemilihan kepala desa Simpursia, Muhammad Husain akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri dan rela melepaskan keanggotaannya dari TNI.

Secara tradisional masyarakat bugis Wajo masih sangat kental dengan budaya patron yang dianut dari sejarah kerajaan-kerajaan Wajo pada masa lalu. Kondisi tersebut masih banyak dimanfaatkan oleh elit-elit lokal untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan tanpa terkecuali pada pemilihan kepala desa. Sehingga

secara garis besar para kepala desa di Kabupaten Wajo ini merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Tetapi hal berbeda terjadi di Desa Simpursia, dimana kepala desa yang terpilih bukanlah masyarakat asli Desa Simpursia maupun Kabupaten Wajo. Muhammad Husain yang merupakan pendatang dari Kabupaten Barru berhasil menjadi kepala desa di Desa Simpursia selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut.

Dalam 3 (tiga) masa pemilihan kepala desa berturut-turut yang diikuti oleh Muhammad Husain selalu meraih suara dominan, dimana pada Pilkades terakhir tahun 2015 dari 4 calon yang ada dia memperoleh 710 (58%) suara. Latar belakang Muhammad Husein sebagai pendatang di Desa Simpursia sedikit menepis anggapan bahwa untuk menjadi kepala desa haruslah berasal dari masyarakat lokal. Maka dari itu, untuk melihat kasus tersebut yang tidak kalah menarik untuk dikaji adalah mengenai perilaku pemilih yang lebih mendukung kepala desa yang notabene sebagai pendatang ketimbang memilih calon kepala desa yang merupakan masyarakat asli desa Simpursia.

Perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa menjadi menarik karena setiap individu dalam menentukan pilihannya memiliki motivasi dan alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang mungkin sulit untuk diprediksi. Perilaku pemilih merupakan bagian dari sebuah proses dan dinamika politik yang sangat menentukan proses demokrasi berjalan baik maupun tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perilaku-perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Simpursia berdasarkan fenomena politik yang ada. Maka dengan ini penulis menetapkan penelitian dengan judul **“Perilaku Pemilih**

Dalam Menentukan Pilihan Terhadap Kepala Desa Petahana Pada Pemilihan Kepala Desa Simpursia Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perilaku kelompok pemilih petahana dalam Pemilihan Kepala Desa Simpursia tahun 2015 ?
2. Apa pertimbangan dari kelompok pemilih petahana dalam menentukan pilihannya terhadap calon petahana pada Pemilihan Kepala Desa Simpursia tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka dalam hal ini diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan sehingga dapat berguna kedepannya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui perilaku kelompok pemilih petahana dalam Pemilihan Kepala Desa Simpursia tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan dari kelompok pemilih dalam menentukan pilihannya kepada kepala desa petahana dalam pemilihan Kepala Desa Simpursia tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat kepada bidang yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

- a. Manfaat terotitis dari penelitian ini adalah agar dapat memberi sumbangsih berupa pemikiran kepada berbagai pihak akademis maupun non-akademis dalam menambah khasanah keilmuan mengenai perilaku pemilih dan pertimbangan pemilih dalam pemilihan kepala desa.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran berupa konsep atau masukan kepada kepala desa agar dapat menjalankan kinerja pemerintahan secara efektif dan meraih simpati/dukungan dari konsituen maupun pemilih di suatu pedesaan.

E. Studi Terdahulu

1. Penelitian (Fitriyah, 2013) dengan judul “Perilaku Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Kudus” dilakukan dengan metode penelitian survei. penelitian tersebut melihat bagaimana perilaku pemilih dari faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat dari sisi faktor politik uang. Dari hasil penelitian yang ada ditemukan bahwa faktor sosiologis dan psikologis tidak menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya kepada salah satu calon. Namun, dari sisi faktor ekonomis menunjukkan bahwa faktor tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan politik dalam Pilkada Kudus tahun

2013. Pemilih melihat bahwa dibawah kepemimpinan Mushtofa (petahana) Kabupaten Kudus jauh lebih baik. Kemudian dilihat dari sisi politik uang, penelitian ini menemukan adanya indikasi politik uang tetapi belum bisa dipastikan sebagai salah satu pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.

2. Penelitian (Azmi, 2014) dengan judul “Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” dilakukan dengan metode penelitian survei. Penelitian tersebut mencoba untuk melihat bagaimana perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan pada pemilihan capres dan cawapres 2014 dengan menggunakan tiga pendekatan utama perilaku pemilih, yaitu pendekatan Sosiologi, Psikologi dan Pilihan Rasional. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pemilih pemula di Kabupaten Kendal secara umum merupakan pemilih rasional yang memilih berdasarkan visi, misi dan program kerja kandidat. Kemudian untuk pendekatan sosiologi pemilih pemula mengabaikan faktor umur dan latar belakang profesi pasangan capres dan cawapres. Berikutnya dalam pendekatan psikologi ditemukan bahwa faktor figure kandidat lebih berpengaruh dari partai politik pengusung. Selanjutnya berdasarkan pendekatan pilihan rasional pemilih pemula merasa yakin bahwa pilihan mereka mampu menjalankan program kerjanya untuk mengatasi masalah kemiskinan, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan.
3. Penelitian (Gerungan, 2015) dengan judul “Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015

(Suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)” dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut mencoba melihat bagaimana perilaku pemilih dalam pemilihan gubernur dengan tiga kategori pendekatan perilaku pemilih yaitu, Pemilih Rasional, Pemilih Kritis dan Pemilih Tradisional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kategori pemilih rasional ditemukan beberapa warga yang memiliki karakter tersebut, masyarakat memperhitungkan apa keuntungan bagi mereka ketika memilih calon gubernur yang dimana hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan informan yang cukup baik. Berikutnya untuk kategori pemilih kritis dalam hal ini tidak dijumpai di desa tersebut, karena mereka sepenuhnya percaya pada pilihan mereka. Kemudian untuk kategori pemilih tradisional di desa tersebut jumlah sangat sedikit dan jenis pemilih tersebut sulit ditemukan dalam pemilihan gubernur tersebut.

4. Penelitian (Astuti, 2015) dengan judul “Study Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Periode 2013-2019” dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian tersebut mencoba untuk bagaimana perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa dengan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor pendidikan (81,12%) dan figure calon (82,29%) sangat mempengaruhi pilihan mereka serta faktor umur muda (54,17%) juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih. Selain itu faktor kesamaan agama (72,92%) juga menjadi pertimbangan pemilih tetapi dilain sisi faktor etnis/kesamaan suku (28,13%).

5. Penelitian (Hutomo, 2015) dengan judul “Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014)” dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian tersebut berdasar kepada tiga pendekatan utama perilaku pemilih, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Fokus penelitian terhadap hubungan antara kesesuaian program kandidat, kampanye kandidat, identifikasi partai dan pemberian uang kompensasi kandidat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari empat variabel (kesesuaian program, kampanye, identifikasi partai, pemberian uang) yang diuji ternyata hanya ada dua variabel yang mempunyai kesesuaian yang kuat yaitu kesesuaian program dan kampanye, sedangkan variabel identifikasi partai dan pemberian imbalan uang tidak ada hubungannya dengan pilihan partai politik yang akan dipilih. Dari penelitian tersebut membenarkan pendekatan rasional dimana memilih memilih partai dengan program yang sesuai dengan harapan pribadinya. Kemudian selanjutnya pendekatan sosiologi juga ditemukan dimana intensitas sosialisasi atau kampanye mempengaruhi perilaku pemilih.
6. Penelitian (Mopeng, 2016) dengan judul “Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi) dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dalam penelitian tersebut mencoba melihat perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dengan tiga pendekatan perilaku pemilih yaitu,

pendekatan sosiologis, psikologi dan pilihan rasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pendekatan sosiologis ditemukan bahwa pemilih cenderung memilih dari faktor sosiologis berdasarkan jabatan ataupun pekerjaan, dimana adanya anggapan bahwa pemilih tersebut memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang diterima oleh salah satu kandidat. Selanjutnya dalam pendekatan psikologis ditemukan bahwa pemilih dalam menentukan pilihan tidak lagi melihat dari faktor partai pendukung tetapi lebih kepada figure calon kandidat. Kemudian untuk pendekatan pilihan rasional ditemukan bahwa perilaku pemilih disebabkan karena adanya rasa kecewa terhadap salah satu kandidat sehingga lebih memikirkan untung-rugi ketika menentukan pilihannya.

7. Penelitian (Kadir, 2017) dengan judul “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Studi Kasus (di Kecamatan Kepenuhan Hulu)” dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian tersebut mencoba melihat perilaku pemilih dengan tiga pendekatan perilaku pemilih yaitu, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam pendekatan sosiologis perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor etnis atau suku kandidat. Selanjutnya dalam pendekatan psikologis bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh latar belakang partai pengusung dan orientasi visi dan misi kandidat. Kemudian untuk pendekatan rasional ditemukan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kekompakan kandidat dalam pembangunan daerah tetapi disisi lain ternyata ditemukan bahwa keuntungan pribadi seperti

pembagian sembako juga menjadi pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihannya.

8. Penelitian (Pratiwi, 2017) dengan judul “Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Mowila” dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut mencoba melihat perilaku pemilih pemula dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari segi pendekatan sosiologis tidak sedikit pemilih pemula menjatuhkan pilihannya berdasarkan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Selanjutnya untuk pendekatan psikologis dalam menentukan pilihannya pemilih pemula melihat kepada figure kandidat yang memiliki kharismatik dan ketokohan yang kuat. Kemudian dalam pendekatan pilihan rasional pemilih pemula melihat dari prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kandidat.
9. Penelitian (Novianto, 2017) dengan judul “Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015”. Dilakukan dengan jenis penelitian survey. Dalam penelitian mencoba menganalisis bagaimana perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologi dan pilihan rasional. Hasil dari penelitian tersebut menemukan tingginya potensi angka golput yaitu dikisaran angka 41,28%. Tinggi angka golput tersebut disebabkan masih adanya harapan masyarakat terhadap *money politic*. Pemilihan kepala daerah Kutai Kartanegara tersebut dimenangkan oleh

pasangan Hj. Rita Widyasari – Edi Damansyah dengan suara dominan 84,2%. Kemengangan tersebut diraih karena tinggi tingkat popularitas pasangan tersebut. Perilaku pemilih berdasarkan pendekatan yang ada sangat mempengaruhi pilihan masyarakat. Selain itu, faktor kemenangan yang diraih pasangan tersebut juga disebabkan oleh kekuasaan birokrasi (petahana) dan meraih suara dominan kursi di DPRD. Keterpilihan petahana ini karena masih tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat dengan kelanjutan program kerja dan pembangunan yang telah dicanangkan.

10. Penelitian (Mulyadi, 2018) dengan judul “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatra Barat Tahun 2018” dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut mencoba menganalisa bagaimana perilaku pemilih dalam pemilihan Wali Nagari (Kepala Desa) dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya sangat memperhatikan bagaimana latar belakang keluarga dan kekerabatan, faktor sosial calon ditengah masyarakat dan faktor tingkat pendidikan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana perilaku pemilih dalam menentukan calon yang akan dipilihnya pada pemilihan Wali Nagari Rabi Jonggor.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai perilaku pemilih yang telah dijabarkan satu-persatu di atas dapat dilihat bahwa dalam meneliti tentang perilaku pemilih dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Perbedaan dari dua jenis penelitian tersebut terdapat pada hasil dari penelitiannya,

dimana dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif menghasilkan sebuah generalisasi atau satu kesimpulan yang mengikat kepada teori yang ditetapkan. Sedangkan dalam penelitian yang berbasis kualitatif lebih menekankan kepada kedalaman informasi berdasarkan teori yang ditetapkan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis akan lebih menekankan kepada penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan kepada kedalaman informasi berdasarkan dari pendekatan ataupun teori perilaku pemilih. Berdasarkan studi terdahulu yang ada saya melihat bahwa kebanyakan atau hampir seluruhnya melihat perilaku pemilih secara umum terhadap pilihannya kepada semua calon kandidat, maka dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada perilaku pemilih yang menetapkan pilihannya kepada calon kepala desa petahana. Sehingga menurut penulis jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk melihat bagaimana fenomena perilaku pemilih secara lebih mendalam.

F. Kerangka Teori

1. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami motivasi dan latar belakang konstituen terhadap menentukan pilihannya dalam sebuah *voting* (pemilihan umum). Pada dasarnya perilaku pemilih merupakan bagian dari konsep partisipasi pemilih. Dimensi perilaku pemilih sendiri adalah salah satu fokus perhatian dalam studi partisipasi pemilih dalam rentang masa pemilihan (*in-election period*). Dalam perkembangan studi tentang perilaku pemilih menghasilkan tiga perspektif yang sangat terkenal. Perspektif tersebut dibagi

kedalam pendekatan sosiologis atau madzab Columbia, dipopulerkan oleh Paul F. Lazarsfeld melalui publikasinya “*The People’s Choice*” dengan mengusung konsep “*index of political predisposition*”; pendekatan psikologis atau madzab Michigan, diperkenalkan oleh Angus Campbell melalui publikasinya “*The Voter Decides*” dengan mengusung konsep “*party identification*”; dan terakhir pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) diperkenalkan oleh Anthony Downs melalui publikasinya “*An Economic Theory of Democracy*”. (Pamungkas, 2012)

Dalam pendekatan/proposisi perilaku pemilih dimana telah disebutkan bahwa terdapat teori besar meliputi *pertama*, teori sosiologis, dimana keputusan dan partisipasi seseorang dalam pemilihan umum dilatarbelakangi oleh faktor agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya, *kedua*, teori psikologis, dimana keputusan dan partisipasi seseorang dalam pemilihan umum dilatarbelakangi oleh kedekatan pemilih dengan kandidat ataupun partai politik dan *ketiga*, teori pilihan rasional, dimana keputusan dan partisipasi seseorang dalam pemilihan umum dilatar belakang oleh pertimbangan rasional bahwa dengan pemilihan tersebut maka akan menjadi media dalam mendukung perubahan atau penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi. (Firmanzah, 2008:85)

Dalam perilaku pemilih terdapat instrumen tentang partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik dalam pilkada atau pemilu. Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan dan

kebijakan maupun pelaksanaan keputusan/kebijakan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya, jika terjadi sebaliknya maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik. (Huntington & Nelson dalam Mas'ood & Andrews, 2010:188)

Menurut Mahendra (2005:75) bahwa perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang/kandidat, partai politik ataupun isu publik tertentu. Kemudian menurut Ramlan Surbakti dalam Efriza (2012:480) menyatakan bahwa perilaku pemilih adalah :

“Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.”

Dalam membedakan perilaku pemilih Surbakti (2010:186) membaginya kedalam lima pendekatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Struktural

Pemilih dalam pendekatan struktural dipandang sebagai kegiatan memilih yang berdasarkan kepada konteks struktur secara luas, seperti struktur sosial, sistem kandidasi, sistem pemilihan, dan program yang diajukan oleh kandidat.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menempatkan kegiatan pemilih dalam konteks sosial. Dimana dalam hal menentukan pilihannya seorang akan dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, etnis, dan agama.

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis ini melihat kegiatan pemilih berdasarkan daerah pemilihan. Pendekatan ini hanya relevan digunakan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga dalam konteks ini pendekatan ekologis hanya cocok digunakan dalam pemilihan umum.

d. Pendekatan Psikologis

Dalam pendekatan psikologis mencoba untuk menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan indentifikasi terhadap kandidat dan keterikatan pemilih secara emosional terhadap kandidat.

e. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional ini melihat suatu kegiatan pemilih sebagai kalkulasi untung dan rugi. Perilaku pemilih dalam pendekatan ini memandang bahwa hasil dari pilihannya dapat memberikan dampak dan keuntungan bagi dirinya secara pribadi.

Kemudian Firmanzah (2008:120), menjelaskan bahwa perilaku pemilih dapat dikelompokkan dalam empat jenis pendekatan. Adapun empat jenis pendekatan perilaku pemilih tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemilih Rasional

Dalam jenis pendekatan pertama yaitu pemilih rasional atau *rational voter*, merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada orientasi tinggi pemilih kebijakan untuk pemecahan masalah (*policy problem*

solving) dan sebaliknya memiliki orientasi yang rendah terhadap faktor-faktor ideologi. Pemilih yang termasuk dalam jenis pendekatan ini sangat mengutamakan kemampuan dari suatu partai politik atau calon kandidat dalam memaparkan program kerjanya. Ciri khas dari pemilih jenis ini yaitu tidak terlalu mementingkan adanya ikatan-katan ideologi terhadap partai politik maupun calon kandidat. Adanya faktor seperti asal-asul, budaya, nilai tradisional, agama dan psikografis juga memang sedikit dipertimbangkan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal utama yang menjadi pertimbangan bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan telah dilakukan oleh suatu partai politik maupun calon kandidat dibandingkan dengan nilai ideologi yang memiliki. Oleh karena itu, bagi partai politik maupun calon kandidat yang ingin menarik perhatian dalam pemilih jenis pemilih rasional ini harus memberikan solusi logis terhadap berbagai permasalahan, seperti ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, kesejahteraan, dan masalah utama lainnya. Jenis pemilih rasional ini tidak akan ragu-ragu untuk berpindah haluan dari sebuah partai politik atau calon kandidat ke partai politik dan calon kandidat lainnya ketika mereka dianggap tidak mampu memberikan solusi dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

b. Pemilih Kritis

Pemilih dalam pendekatan jenis pemilih kritis ini adalah perpaduan antara tingginya orientasi terhadap kemampuan suatu partai politik maupun calon kandidat dalam memberikan solusi dan penyelesaian masalah, begitu

juga dengan tingginya orientasi terhadap hal-hal yang sifatnya ideologis. Ikatan ideologis yang menjadi penting bagi pemilih jenis ini berdampak kepada pembentukan loyalitas pemilih. Pemilih loyal yang terbentuk karena adanya kesamaan nilai ideologis ini membuat pemilih jenis ini tidak mudah untuk berpindah ke partai politik maupun calon kandidat lain seperti halnya pada jenis pemilih rasional. Dalam pemilih jenis ini terdapat dua mekanisme yang membuat sehingga bisa dikelompokkan dalam jenis pemilih kritis. Pertama, pemilih jenis ini menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai landasan utama untuk menentukan pilihan terhadap suatu partai politik maupun calon kandidat dan selanjutnya mereka akan memberikan kritikan terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pilihannya. Kedua, bisa terjadi dengan keadaan sebaliknya yaitu pemilih ini lebih dahulu tertarik pada program kerja yang ditawarkan oleh suatu partai politik maupun calon kandidat kemudian setelah itu baru mencoba untuk memahami nilai-nilai dan latar belakang ideologi suatu partai politik maupun calon kandidat yang dipilih nantinya.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam pendekatan tradisional ini merupakan jenis pemilih yang memiliki orientasi begitu tinggi terhadap nilai-nilai dan paham ideologis dan tidak terlalu mementingkan kemampuan suatu partai politik maupun calon kandidat dalam membuat kebijakan terhadap permasalahan yang ada. Pemilih jenis tradisional ini sangat mementingkan adanya kesamaan nilai-nilai sosial-budaya, agama, dan asal-asul dalam menentukan

pilihan terhadap partai politik maupun calon kandidat. Kebijakan dan program kerja terhadap permasalahan, seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dijadikan sebagai prioritas kedua. Dalam pemilih jenis tradisional ini lebih mementingkan figur, kepribadian pemimpin, dan jejak historis dari suatu partai politik maupun calon kandidat. Ciri khas dan karakteristik dari jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat kuat dalam memegang nilai-nilai dan paham yang dipercayainya.

d. **Pemilih Skeptis**

Pemilih dalam pendekatan jenis skeptis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi terhadap partai politik ataupun seorang calon kandidat, dan juga melihat suatu kebijakan bukan sesuatu yang penting. Pemilih jenis skeptis ini keinginan untuk terlibat dalam partai politik sangat kurang, karena memang kedekatan secara ideologis juga sangat rendah. Golongan putih (golput) dalam pemilihan di Indonesia atau dimanapun didominasi oleh kalangan pemilih ini. Walaupun ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka hanya memilih secara acak. Mereka beranggapan bahwa siapapun yang terpilih tidak akan pernah bisa membawa perbaikan kearah yang lebih baik. Selain itu, mereka juga tidak memiliki keterikatan secara emosional terhadap partai ataupun kontestan tertentu.

2. Pemilihan Kepala Desa

Sistem demokrasi dan politik desa merupakan struktur politik yang paling rendah tingkatannya dalam tatanan sistem demokrasi Indonesia. Walaupun demikian, struktur perpolitikan desa ini memiliki peranan yang kuat dalam

membentuk dan membangun sistem demokrasi Indonesia sebagai negara. Karena sebenarnya di desa inilah kehidupan politik yang sesungguhnya terjadi dengan berbagai dinamika yang ada. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan atas keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. (Samego, 1994:22-23)

Secara harfiah desa hanya dikenal di pulau Jawa. Ada beberapa penyebutan lain yang merujuk pada pengertian desa, yaitu dusun, kuta, gampong, nagari dan seterusnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1993), desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) udik atau dusun; (3) tempat; tanah; daerah. Pengertian ini berangkat dari kontras pemahaman mengenai kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 2 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sedangkan pasal 1 dan angka 3 berbunyi “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa adalah penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Desa, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan keterlibatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Kepala Desa bertugas; menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Mempimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- h. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- i. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- j. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara persitipatif
- k. Mewakili desa dalam dan luar pengadilan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain.

Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu juga dijelaskan bahwa pemilihan kepala Desa ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang terdapat pada pasal 3 sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan
 - 1) Pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
 - 2) Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
 - 3) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

- 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada bupati melalui camat atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan
 - 5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD
- b. Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan
- 1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
 - 2) Penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
 - 3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon
 - 4) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa
 - 5) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
 - 6) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
- c. Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan
- 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 - 2) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak

- d. Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan
- 1) Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara
 - 2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan PPKD
 - 3) Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD
 - 4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Petahana (*Incumbent*)

Petahana merupakan istilah baru yang dapat diartikan sebagai tahana yang dapat diartikan sebagai kedudukan atau martabat dalam kekuasaan. Dalam proposisi yang berbeda petahana juga dapat disebut sebagai *incumbent* yaitu pihak yang menduduki suatu kepemimpinan yang secara sah ikut kembali dalam ajang pemilihan umum. Gordon dan Landa (2002) menyatakan bahwa :

“...The position of incumbent on election events in developing countries, either the center or the selection region is indeed much benefited as the public service and the truth. On other side, incumbent figure many gain an advantage over his position. Mastery over the problem solving capacity, mastery over service, mastery over the image make it can better win the election event”. (Gardon & Landa, 2002:218)

(petahana pada even pemilihan umum di negara-negara berkembang, baik pusat ataupun pemilihan wilayah memang banyak

diuntungkan sebagai pusat layanan dan kebenaran. Petahana banyak memperoleh keuntungan atas posisinya. Penguasaan atas data, penguasaan atas layanan, penguasaan atas citra membuatnya dapat lebih memenangkan even pemilihan umum tersebut)

Dalam hubungannya dengan pemilih (konstituen) petahana menjadi begitu erat. Terlepas dari buruk atau tidaknya petahana dalam menjalankan pemerintahan, figur pemimpin ini akan lebih dulu terkenal dan populer di kalangan masyarakat. Ini kemudian memiliki dampak positif bagi petahana karena secara tidak langsung petahana akan mengasasi geografi, demografi, kapasitas dan potensi ekonomi, pemahaman terhadap kultur hingga adat-istiadat dan lain-lainnya secara sistematis dan empiris melalui kinerja hingga mobilisasi perangkat kerja yang ada di dalamnya.

Dalam even pemilihan umum petahana memiliki beberapa keleluasaan berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola kapasitas dan kemampuan yang ada. Dengan kata lain, Gordon dan Landa mengemukakan bahwa seorang elit petahana dapat membingkai peristiwa sedemikian rupa, sehingga khalayak (pemilih) dapat memiliki perasaan yang sama dengan mengkomunikasikan melalui berbagai macam simbol atas pencapaian yang selama ini dijalankan menggunakan nilai hingga retorika.

Kemampuan petahana dalam memenangkan pemilihan umum akan dapat memenuhi apa yang disebut dengan *aggregate frame*, yaitu proses pendistribusian isu dan persoalan yang terjadi di suatu wilayah. Petahana akan memprioritaskan berbagai persoalan tertentu, baik ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan lain-lainnya. Semua ini akan mengarah pada fakta bahwa langkah yang lebih mudah dalam membangun citra pada kampanye hingga menjelang pemilihan.

4. Kepemimpinan

Salah satu aktor penting yang menjadi bagian penting dari proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan politik lahir dari sebuah proses demokrasi yang berlangsung dalam sebuah kontestasi politik. Menurut Cleeton dan Mason dalam Syafiie (2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang melalui imbauan ataupun pendekatan emosional yang lebih dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Kepemimpinan itu sendiri merupakan bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Kemiripan kekuasaan dan kepemimpinan terdapat pada hubungan yang dibangun antara pihak yang memiliki pengaruh dan pihak-pihak yang dipengaruhi, dan juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan, kepemimpinan lebih menekankan kepada kemampuan penggunaan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, kepemimpinan merupakan upaya untuk melaksanakan tujuan yang menjadi kepentingan bersama. (Surbakti, 2010:171)

Lebih lanjut Surbakti (2010:178) menjelaskan bahwa kepemimpinan berdasarkan sumber kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a) Kepemimpinan rasional, yaitu bersumberkan kepada kewenangan legal yang beranjak dari legalitas pola-pola aturan normatif dan orang-orang yang terpilih memiliki hak dan kewenangan berdasarkan peraturan untuk mengeluarkan perintah.

- b) Kepemimpinan tradisional, yaitu bersumber kepada kewenangan tradisional yang beranjak dari kepercayaan yang sudah mapan terhadap tradisi-tradisi yang dianggap perlu dipatuhi.
- c) Kepemimpinan karismatis, yaitu berpegang kepada kekaguman masyarakat terhadap seorang pemimpin yang memiliki kelebihan yang luar biasa, dan karena itu juga terhadap peraturan dan perintah yang dikeluarkannya.

Kemudian dijelaskan mengenai tipe kepemimpinan yang menggambarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dikemukakan oleh Burns dalam Surbakti (2010:178), bahwa kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Kepemimpinan transaksional, terjadi apabila seorang pemimpin mengambil prakarsa untuk melakukan kontak dengan pihak lain dengan tujuan untuk melakukan pertukaran nilai-nilai yang dianggap penting. Pertukaran tersebut mencakup bidang-bidang politik, seperti suara (*votes*) dan kekuasaan. Kepemimpinan semacam ini tidak menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara pemimpin dan yang dipimpin.
- b) Kepemimpinan transformatif, terjadi manakala seseorang atau lebih terlibat dengan orang lain sedemikian rupa sehingga mengangkat pemimpin dan yang dipimpin ke tingkat moral, motivasi, dan kegiatan yang lebih tinggi. Tujuan mereka yang tadinya terpisah jadi menyatu, dan sumber kekuasaan digunakan tidak untuk tawar-tawar menawar tetapi digunakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

5. Populisme

Populisme merupakan suatu paham politik yang diartikan sebagai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil. Sehingga seringkali paham-paham populis ini digunakan sebagai instrumen dalam kampanye, karena paham ini membawa misi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat masyarakat serta adanya keinginan kuat untuk menciptakan hubungan integrasi sosial yang seimbang dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini Kosuke dan Phongpaichit (2009) mendefinisikan populisme, sebagai :

“...Wisdom lies among the ordinary people. This wisdom, that is common sense, is necessary and sufficient to make political decisions. The people acquire this wisdom through productive works, not by reading books or through speculation. This notion is anti-intellectual, and denies technocratic knowledge in politics. It supports direct democracy, that is, politics by the people themselves”. (Kosuke & Phongpaichit, 2009:3)

(Kebijaksanaan terletak di antara orang-orang biasa. Kebijakan ini, yang masuk akal, diperlukan dan cukup untuk membuat keputusan politik. Orang-orang memperoleh kebijakan ini melalui karya-karya produktif, bukan dengan membaca buku atau melalui spekulasi. Gagasan ini adalah anti-intelektual dan menyangkal pengetahuan teknokratis dalam politik. Ini mendukung langsung demokrasi, yaitu politik oleh rakyat sendiri)

Berdasarkan dari pendapat Mizuno dan Phongpaichit, maka politik populis itu sendiri dapat diartikan sebagai gaya politik yang hadir dari masyarakat biasa atau yang dikenal dengan masyarakat sipil. Pada intinya, dalam paham populis ini menolak sebuah pernyataan politik bahwa pemerintahan hanya dapat dijalankan oleh seorang teknokrat saja. Pembentukan kebijakan populisme ini didasarkan kepada kepentingan rakyat kecil. Oleh karena itu, populisme seringkali dimunculkan dalam bentuk pencitraan politik yang sangat dekat dengan kepentingan rakyat kecil.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan yang diangkat peneliti, dengan mengemukakan pandangan umum atau pemahaman mengenai perilaku pemilih dalam ajang pemilihan kepala desa. Untuk mempertegas kajian, maka perlu kiranya memberikan pengertian terhadap satu persatu konsep mengenai judul penelitian, sebagai berikut :

1. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah perilaku atau tindakan-tindakan seseorang dalam menentukan pilihannya pada even pemilihan umum baik di wilayah pusat ataupun daerah yang dianggap paling sesuai atau relevan. Perilaku pemilih dapat dijelaskan juga sebagai bentuk nyata atas partisipasi politik pemilih untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan politik di suatu wilayah, baik negara, provinsi ataupun daerah-daerah pada tingkatan yang lebih kecil yang dapat menjadi upaya untuk mempertahankan kinerja pemerintahan yang cukup baik ataupun dapat mengganti kinerja yang dianggap kurang sejalan.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh warga desa setempat, dimana kandidat kepala desa merupakan warga biasa yang di usung oleh tokoh atau kelompok masyarakat atau dapat juga atas inisiatif sendiri. Umumnya pemilihan kepala desa dijalankan dengan menggunakan simbol-simbol kearifan lokal dan dijalankan secara serentak dengan menggunakan tempat pemungutan dalam jumlah yang cukup kecil.

3. Petahana (*Incumbent*)

Petahana atau yang biasa dikenal dengan *Incumbent* ini merupakan suatu kedudukan dimana jika seseorang yang memiliki jabatan politik kembali ikut berkontestasi dalam sebuah pemilihan umum untuk jabatan yang sama. Petahana ini biasanya diuntungkan dengan posisinya sebagai pemegang jabatan pada periode sebelumnya telah memberikan pelayanan dan kinerja kepada masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pendefinisian variabel secara operasional yang berdasarkan pada sifat atau karakteristik terhadap suatu fenomena yang diamati dengan menggunakan parameter yang jelas. Adapun variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah pendekatan utama perilaku, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Sosiologis

Perilaku pemilih dalam pendekatan ini dalam hal menentukan pilihannya dilatar belakangi oleh faktor demografi dan kondisi sosial seperti :

- a. Pekerjaan
- b. Pendidikan
- c. Agama
- d. Etnis/Kedaerahan

2. Pendekatan Psikologis

Perilaku pemilih dalam pendekatan ini dalam hal menentukan pilihannya sangat ditentukan oleh faktor psikologi sosial seseorang seperti :

- a. Identifikasi diri terhadap kandidat
- b. Kedekatan secara emosional terhadap kandidat

3. Pendekatan Rasional

Perilaku pemilih dalam pendekatan ini berperilaku secara rasional dimana dalam menentukan pilihannya memiliki kalkulasi untung rugi dan pemilih rasional ini umumnya tidak terikat dengan ikatan sosiologis ataupun psikologis terhadap kandidat tertentu. Dalam menentukan pilihannya ditentukan oleh faktor seperti :

- a. Keuntungan pribadi yang didapatkan
- b. Kinerja pemerintahan sebelumnya

4. Keuntungan Petahana

Petahana sebagai pemegang jabatan yang kembali ikut berkontestasi akan mendapat keuntungan dalam sebuah pemilihan umum. Keuntungan yang didapatkan atas kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat sebelumnya. Petahana dalam hal ini mendapatkan beberapa keuntungan seperti:

- a. Penguasaan atas data
- b. Penguasaan atas layanan
- c. Penguasaan atas citra

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis yaitu terencana dan cermat. Prosedur tersebut dilakukan guna untuk memperoleh data berupa informasi yang selanjutnya dapat menjawab dan memecahkan permasalahan dengan adanya temuan dalam bentuk fakta dan kesimpulan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut pendapat Bodgan dan Biklen (1990) adalah *“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)”*. (Satori & Komariah, 2014)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan proses kerja untuk mendapatkan hasil berupa pendeskripsian suatu objek, penjelasan fenomena atau *setting* sosial yang kemudian akan dijabarkan dalam suatu kata-kata berupa tulisan yang sifatnya naratif. Mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu berarti memberi pemahaman terkait apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan.

Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu gejala ataupun fenomena sosial. Dengan kata lain bahwa penelitian ini dilakukan agar mendapat gambaran terhadap suatu sifat atau perilaku yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Metode kualitatif ini banyak digunakan untuk memberi informasi yang lengkap sehingga

nantinya dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan metode ini juga telah banyak diterapkan dalam berbagai masalah. Tujuan dari penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk memperoleh pemecahan masalah yang ada hingga saat ini.

Pada dasarnya penelitian yang sifatnya kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman (*to understand*) terhadap suatu gejala sosial atau fenomena dengan memfokuskan kepada penggambaran yang lebih jelas dan lengkap daripada menjabarkannya dalam sebuah variabel-variabel yang terikat satu sama lain. Dengan begitu diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan gejala sosial maupun fenomena yang ada untuk selanjutnya dapat menghasilkan sebuah teori. (Rahardjo, 2010).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sekaligus yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung dari sumber informasi yang dibutuhkan. Penjelasan mengenai sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dengan subjek dan objek penelitian yang dituju.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan data primer,

seperti buku, dokumen, surat kabar, perundang-undangan maupun penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian kelengkapan data sangat penting agar peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan penelitian nantinya akan memberikan petunjuk terhadap data-data yang diperlukan. Maka dari itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai agar peneliti dapat memperoleh data yang sesuai secara terukur dan tepat. Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Dalam observasi ini peneliti berinteraksi langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipatif, yaitu mengamati apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari sumber data langsung (*informan*) melalui percakapan secara langsung. Dalam

penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagaimana yang digunakan pada penelitian kualitatif pada umumnya. Tujuan dari wawancara mendalam ini adalah lebih mendekatkan diri kepada informan agar informasi terkait objek penelitian yang didapatkan lebih mendalam. (Satori & Komariah, 2010:132)

Kemudian dalam penentuan informan penelitian ini akan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Dimana menurut Satori dan Komariah (2010:50) bahwa penentuan informan secara *purposive* dilakukan dengan cara menyesuaikan pada tujuan dan sumber informasi yang diperlukan dari penelitian yang ada. Jadi, dalam penentuan informan penelitian akan dilakukan ketika peneliti datang kelapangan dan pada saat itu akan dilakukan pemilihan informan yang menurut peneliti akan menjadi *key informan* (informan kunci), sehingga nantinya bisa didapatkan informasi yang sesuai dengan situasi sosial dan akan mendukung sumber informasi dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau lebih dikenal dengan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus kepada hasil-hasil dokumentasi yang diterbitkan langsung oleh lembaga atau instansi yang terkait dengan objek penelitian, seperti misalnya publikasi peraturan-peraturan dan laporan hasil kegiatan. Dalam penelitian ini akan melakukan studi dokumentasi berkaitan dengan dokumen profil desa,

jumlah pemilih dan hasil pemilihan Kepala Desa Simpursia pada tahun 2015.

4. Lokasi, Waktu dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpursia Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo pada rentang waktu antara tanggal 5 s/d 7 Januari 2019. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa Simpursia pada tahun 2015. Penelitian ini tidak melihat bagaimana perilaku pemilih yang ada di Desa Simpursia secara umum, tetapi lebih di khususkan kepada pemilih yang menentukan pilihan terhadap kepala desa petahana. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

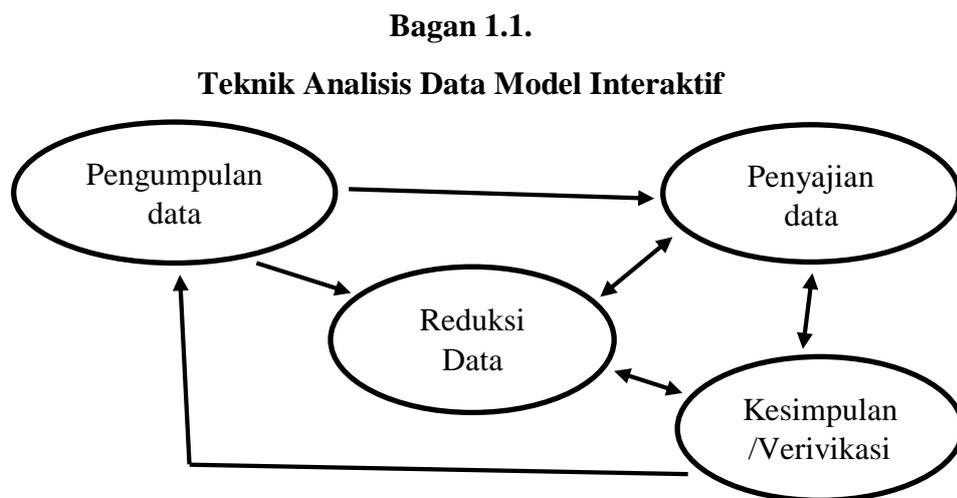
Tabel 1.1.

Nama Informan berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Pekerjaan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Wittiri Jaya	56	Laki-Laki	SMA	Ketua BPD
2	Hj. Satriani	50	Perempuan	S1	Guru SMPN 6 Pammana
3	Rosmini	41	Perempuan	S1	PNS BKBKS
4	Ida Royani	37	Perempuan	SMA	Aparat Desa
5	Daming	60	Laki-Laki	SD	Ketua Kelompok Tani
6	Muhajar	26	Laki-Laki	S1	Tokoh Pemuda
7	Muliati	35	Perempuan	SMP	Ibu Rumah Tangga
8	Iskandar	50	Laki-Laki	SMP	Petani

5. Teknik Analisa Data

Bogdan dan Biklen (1992) berpendapat bahwa analisis data merupakan suatu proses dalam penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis berupa pencarian dan penyusunan data. Hal tersebut dilakukan berdasarkan temuan dari hasil transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen yang diperoleh. Proses yang dilakukan secara terstruktur tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam memahami data-data yang ada. Kemudian Milles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk dapat menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini proses analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama sebelum dan sesudah proses pengumpulan data. Adapun tahapan mengenai analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) dapat dilihat pada bagan 1.1. sebagai berikut :



Sumber: Diolah dari Husaini dan Setiady (2009:88)

Melalui bagan 1.1. di atas dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, antara lain:

- a. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
- b. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- c. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.